



## PERAN PEMERINTAH NAGARI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI NAGARI KOTO SANI KABUPATEN SOLOK

**Bahri Lazuardi Luthfiano**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

[Bahrilazuardi1999@gmail.com](mailto:Bahrilazuardi1999@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to determine the role of the nagari government in increasing public awareness and participation in paying land and building taxes in Nagari Koto Sani, Solok Regency. The background of this study explains the lack of public awareness and participation, this can be seen when the community pays taxes and is picked up directly by tax collectors from door to door. Lack of public understanding of the importance of taxes and obligations requires serious attention. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. Test the validity of the data with triangulation techniques. Collecting data through interviews, documentation and observation. The data analysis technique that the researcher uses is the manual data analysis procedure (MDAP). The results of the study explain that the causative factors are: high sense of laziness, lots of tax object errors, lack of tax collectors. Then the efforts of the nagari government to raise awareness and increase participation in paying land and building taxes: various socializations were carried out to the community, first a meeting with the nagari guardian, an appeal to the community, distribution of billboards installed on the highway, calendar distribution, local government door prize events held at Kayu Aro and community door-to-door services.*

**Keywords:** Village Government, Awareness, Society participation, Building and Land Tax

### ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran pemerintah nagari dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Nagari Koto Sani Kabupaten Solok. Latar Belakang penelitian ini menjelaskan tentang masih lemahnya kesadaran masyarakat serta partisipasi, hal ini dapat dilihat ketika masyarakat tersebut membayar pajak dijemput secara langsung oleh petugas pemungut pajak dari pintu ke pintu. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting pajak dan kewajiban memerlukan perhatian yang serius. Penelitian ini dilakukan

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah *manual data analysis procedure* (MDAP). Hasil dari penelitian menjelaskan terdapat bahwa faktor penyebab yaitu : tingginya rasa malas, banyak kesalahan objek pajak, kurangnya tenaga pemungut pajak. Lalu upaya pemerintah nagari menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi dalam membayar pajak bumi dan bangunan : adanya dilakukan berbagai sosialisasi ke masyarakat terlebih dahulu dilakukan pertemuan ke wali nagari , himbuan keliling kepada masyarakat, sebaran baliho yang terpasang di jalan raya, pembagian kalender, event doorprise pemerintah daerah diadakan di Kayu Aro dan pelayanan pintu ke pintu masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemerintah Nagari, Kesadaran dan Partisipasi, Pajak Bumi dan Bangunan

## PENDAHULUAN

Pajak ialah satu diantara sumber pendapatan negara dengan memiliki potensi besar untuk melakukan kegiatan disegala bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Pajak menjadi satu diantara penerimaan paling besar kenegaraan Indonesia selain minyak dan gas bumi tanpa pajak pemasukan negara akan bekurang dikarenakan keadaan finansial kenegaraan tak lagi hanya penerimaannya gas bumi juga minyak sajalah (Handayani, 2018). Pajak Bumi dan Bangunan ataupun PBB ialah satu diantara faktornya pemasukan untuk kenegaraan dengancukuplah berpotensi besar juga memberikan kontribusi pada pendapatannya daerah. (Lubis, 2018)

Upaya dalam meningkatkan pendapatan atau pemasukan negara dari sektor perpajakan ialah perhal dengan sangatlah penting. Maka upaya dalam peningkatannya pajak menjadi kegiatan yang penting untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh melalui pembangunan-pembangunan yang ada.

Nagari Koto Sani merupakan suatu nagari dengan memiliki keterletakan pada Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Asal usul Nagari Koto Sani menurut penduduk sekitar merupakan tempat perkebunan masyarakat yang sudah ada jauh sebelum masa penjajahan Belanda.

Di setiap nagari tersebut terdapat 4 (empat) Desa, yaitu: (1) Kasiak (2) Limo Niniak (3) Ujung Ladang (4) Padang Belimbing. Jumlah penduduk Nagari Koto sani sekitar 7.565 jiwa, dengan mata pencarian pada umumnya pertanian dan peternakan.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Kesra Lali Kondia mengatakan pada tahun 2020 yang lalu tingkatan kesadaran publik ketika melakukan pembayaran perpajakan masihlah rendah, perhal tersebut bisa dilihat ketika masyarakat tersebut membayar pajak ketika dijemput langsung oleh petugas kantor wali nagari. Hampir seluruh pajak tersebut dikutip secara langsung dari pintu ke pintu. Hanya masyarakat yang tinggal di sekitar kantor wali nagari yang membayar langsung ke kantor. Kemudian ketika petugas memungut pajak

langsung kerumah, hanya beberapa saja yang langsung membayar pada hari itu juga. Berbagai macam alasan masyarakat yang diterima petugas seperti belum ada uang untuk membayar pajak, menunggu hasil panen, menunggu bulan baru. dalam memungut pajak membutuhkan kesabaran dikarenakan membutuhkan tiga kali bolak balik untuk mendapatkan pajak dari satu objek pajak saja.

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah nagari dalam melaksanakan suatu pembangunan, maka pemerintah akan melakukan suatu intervensi yang luas tergantung pada kapabilitas masyarakat. Pemungutannya perpajakan dilaksanakan sesuai UU yang berlaku, dengan arti pemungutannya perpajakan telah dicapai kesepakatan secara sama-sama oleh pemerintahan dan publik.

Bersama keberadaan iurannya perpajakan ini diharapkan mampu memberikan bantuan prosesnya pembangunan nagari saat sekarang. Sepertimana diketahui pajak ialah satu diantara penerimaannya finansial sektor dengan berpotensi juga kemudian dilakukan pemanfaatan atas pemerintahan guna kepentingannya secara sama-sama pada prosesnya pembangunan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Objek Pajak Nagari Koto Sani**

No	Nama Jorong	Jumlah OP
1	Padang Belimbing	1305
2	Kasiek	828
3	Limo Ninik	1005
4	Ujung Ladang	538
TOTAL		3676

Dilihat dari tabel di atas jumlah objek pajak di Nagari Koto Sani mencapai angka 3676 yang terdaftar, masih banyak objek pajak lainnya yang belum terdaftar di kantor pajak. Tinggi nya potensi dari PBB di Nagari tersebut harus dipungut dan di optimalkan pemanfaatan dari pajak itu sendiri

Namun kenyataanya pada saat sekarang terdapat halangan yang dihadapinya pada pemungutan pajak. Perihal tersebut dikarenakan minimnya kesadaran publik ketika melakukan pembayaran perpajakan, dan masih kurangnya pemahaman dari beberapa masyarakat atau tidak mengerti pajak, serta terdapat dari beberapa masyarakat yang tak mengerjakan suatu perihal wajib ketika melakukan pembayaran pajaknya juga datanya yang diberikannya oleh pemerintah terhadap publik tak berdasar keadaan dilapangan sehingga menyebabkan minimnya publik pada partisipasinya melakukan pembayaran PBB (Wirada, 2019)

**Gambar 1.1**  
**Monitoring Pendapatan Daerah Kab. Solok 2020**



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar Kabupaten Solok yaitu sektor pajak yang mencakup satu diantara jenisnyaperpajakanyakni PBB. Pendapatan asli daerah kabupaten Solok dari hasil pajak daerah hanya 81,79% yang terrealisasikan dan sisanya 18,21% belum mencapai target.

Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan ketika melakukan pembayaran PBB seperti masihlah banyaknya publik dengan belumlah memiliki kesadaran bahwa melakukan pembayaran PBB merupakan kewajiban dan harus dibayar. Kemudian tingginya rasa malas masyarakat ketika datang waktunya membayar pajak. Kurangnya bukti nyata dari hasil pajak yang masyarakat bayar, kurangnya sumber daya manusia dalam mengutip pajak menjadi sebuah hambatan tersendiri

Dalam hal ini hendaknya pemerintah nagari selaku organisasi terdekat dari masyarakat perlu mengambil tindakan tegas terhadap publik yang belumlah maupun tidaklah sama sekalimelakukan pembayaran PBB serta perlu menggiatkan himbauan ,sosialisasi beserta perankepemerintahan daerah ketika melakukan peningkatan kesadaran dan partisipasinya publik ketika melakukan pembayaran PBB ke semua kalangan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi suatu masalah atau fenomena. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan judul penelitian maka lokasi dilakukannya penelitian dilakukan di Kantor Wali Nagari Koto Sani Kabupaten Solok. Teknik analisis yang peneliti gunakan ialah *manual data analysis procedure* (MDAP). Sebagai prosedur, MDAP memiliki tahap- tahap, mulai dari catatan hingga mencapai memos.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB . Menurut hasil penelitan sebelumnya dari Wirda Dewa Ayu (2019:197) mengatakan dalam upaya pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat, salah satu faktornya yaitu kesadaran dan partisipasi

masyarakat itu sendiri. Dimana kesadaran masyarakat dalam kewajibannya dalam membayar pajak terhambat oleh pola pikir masyarakat itu sendiri. Faktor penghambat kesadaran masyarakat adalah pertama, pembayaran pajak mengurangi penghasilan. Kedua adalah pembayaran pajak menyita waktu bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah nagari, terdapat tiga (3) faktor penyebab: Yang pertama adalah tingginya rasa malas. Tingginya rasa malas masyarakat dalam membayar PBB, dapat dilihat dari masyarakat yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak ketika datang SPPT yang diberikan oleh petugas pemungut pajak, kemudian sikap acuh tak acuh dari masyarakat dapat dilihat dari penjemputan tagihan pajak berulang kali. Seandainya pajak tersebut tidak secara langsung dipungut mereka tidak akan membayar pajak dan lupa akan kewajibannya membayar pajak. Menurut Bapak Meimirda Sekretaris Nagari mengatakan bahwa masih banyak terdapat masyarakat kita ini yang malas bahkan enggan membayar pajak, tidak hanya pajak ini saja, termasuk juga pajak kendaraan dan jenis macam pajak lainnya. Menurut Buletin Para Navigator dalam (Neolaka, 2008), menyatakan bahwa kesadaran adalah modal utama bagi setiap orang yang ingin maju. Tingkat kesadaran masyarakat yang bisa dikatakan rendah dan dibawah rata-rata menjadi masalah disetiap bidang termasuk dalam membayar PBB. Menurut Zeman (2001) dalam Dicky Hastijarjo (2005:81) membagi tiga pokok kesadaran yaitu kesadaran sebagai kondisi terbangun, kesadaran sebagai pengalaman dan kesadaran sebagai pikiran. Dapat disimpulkan bahwa rasa malas yang tinggi menjadi faktor penghambat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Kedua yaitu banyaknya kesalahan objek pajak. Kesalahan objek pajak sering kali terjadi di Nagari Koto Sani dengan berbagai macam alasan seperti perpindahan tangan kepemilikan, penjualan objek yang termasuk kedalam objek pajak. Menurut Siti Rahayu & Devano (2006:73) dalam Permana (2016:3) menyatakan bahwa objek PBB adalah bumi dan bangunan. Dalam menentukan klarifikasi bumi atau tanah harus diperhitungkan faktor-faktor sebagai berikut : (a) letak (b) penentuan (c) pemanfaatan (d) kondisi lingkungan. Adapun yang termasuk kedalam objek pajak adalah rumah, tanah kosong, ladang, sawah, kolam ikan, kebun dan lain-lain. Objek pajak tersebut memiliki nilai jual.

Hasil dari penelitian yang dilakukan selama ini, sering ditemukan kesalahan objek

pajak di Nagari Koto Sani. Hal ini disebabkan oleh perpindahan objek pajak dari pemilik awal ke pemilik kedua dikarenakan jual beli atau pemberian. Misalnya si A menjual tanah ke si B, kemudian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang tertera masih atas nama si A sehingga si B enggan membayar pajak atas SPPT yang lama. Untuk mengeluarkan SPPT yang baru membutuhkan waktu yang lama, sehingga menjadi masalah dalam pemungutan pajak. Hal ini seharusnya dapat diatasi oleh pemerintah daerah sehingga tidak terjadinya lagi masalah seperti ini yang menghambat pemungutan PBB.

Terakhir ketiga yaitu kurangnya tenaga pemungut pajak. Secara geografis Nagari Koto Sani memiliki luas daerah 70 KM<sup>2</sup> dengan topografi perbukitan dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah serta jarak antar rumah masyarakat yang renggagn. Beberapa alasan dibutuhkannya tenaga pemungut pajak yaitu luasnya wilayah nagari terdapat 4 jorong yang dapat dikatakan luas dan terlalu banyak, daerah jorong terpelosok dan terpencil. Sehubungan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah mengakibatkan petugas pemungut pajak sesering mungkin datang kerumah masyarakat dengan kondisi geografis dan topografi tanah di Nagari Koto Sani menjadi sebuah hambatan yang belum terselesaikan hingga saat ini.

#### **b. Upaya Pemerintah Nagari dalam Menumbuhkan Kesadaran dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.**

Dalam(Theresia, Andini, & dkk, 2014) bertolak dari telaah faktor-faktor penentu tumbuh dan berkembanya partisipasi diatas, maka upaya penumbuhan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dalam praktiknya dilakukan melalui kegiatan komunikasi pembangunan (1) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. (2) Menginformasikan adanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. (3) Menunjukan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. (4) Menggerakkan kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.

Untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi , dibutuhkan upaya yang optimal dari Pemerintah Nagari agar tercapainya tujuan pemerintah di bidang pajak. Pengertian

peran menurut Soekanto dalam (Syaron Brigetiete Lantaeda, 2017) yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung. Mengumpulkan pajak bumi dan bangunan merupakan tugas pokok dari Pemerintah Nagari selaku organisasi terdekat dengan masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah nagari adalah :

- 1) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi akan pentingnya membayar PBB melalui tokoh adat dan tokoh masyarakat. Sosialisasi ini biasanya dilakukan rutin di setiap pertemuan atau agenda pemerintah nagari. Sosialisasi melalui tokoh masyarakat dinilai efektif dan dapat menarik perhatian masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat di desa pada umumnya cenderung mendengarkan para tokoh adat disebabkan disegani dan dipercaya oleh masyarakat tersebut. Dengan melalui tokoh adat dan tokoh masyarakat apapun jenis sosialisasi ataupun himbauan yang berasal dari pemerintah akan lebih baik.
- 2) Melakukan himbauan ditempat-tempat umum. Tempat umum yang biasa digunakan yaitu masjid atau mushola di jorong dusun dan lapangan terbuka. Himbauan ini diberitahukan kepada masyarakat ketika jadwal penagihan pajak sudah waktunya.
- 3) Menekan para kader-kader yang ada dilingkungan pemerintah nagari. Maksud dari menekan kader yaitu seandainya ada keluarga yang bersangkutan dengan kader yang belum membayar PBB, maka honor atau dana intensif yang diterima kader ditahan atau tidak dicairkan. Diwajibkan bagi para kader dan keluarganya melunasi pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu, termasuk segala jenis macam bantuan sosial dari pemerintah tidak akan cair jika belum melunasi pajak bumi dan bangunan.
- 4) Memaksimalkan Kepala Jorong dan tenaga-tenaga yang ada dilingkungan pemerintah nagari. Kepala jorong dan petugas pemungut pajak diharapkan dapat memaksimalkan pekerjaannya dalam mengumpulkan pajak bumi dan bangunan secara jempot bola.

Adapun upaya dari pemerintah daerah berupa himbauan keliling menggunakan mobil, menyebarkan selebaran-selebaran, pembagian kalender tahunan, kemudian mengadakan event door prise yang di adakan di daerah Kayu Aro setiap satu kali setahun. Sosialisasi dari pemerintah daerah biasanya diadakan sebanyak tiga kali dalam setahun. Beberapa upaya di atas dari pemerintah nagari dan pemerintah daerah belum sepenuhnya masyarakat yang ikut datang dan berpartisipasi dalam sosialisasi ataupun kegiatan di atas.

### **Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat di Nagari Koto Sani, hal ini dibuktikan dengan tingginya rasa malas akibat masyarakat masih memiliki sifat acuh tak acuh terhadap segala jenis pengeluaran termasuk membayar pajak. Banyaknya kesalahan objek-objek pajak dan kurangnya tenaga pemungut pajak menjadi penghambat dari membayar PBB di Nagari Koto Sani. Adanya upaya peran dari pemerintah dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam menjalankan kewajiban dengan PBB tepat waktu di Nagari Koto Sani. Kemudian jika dilihat dari faktor-faktor penghambatnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama agar dapat menjadi solusi yaitu: intensitas sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di Nagari Koto Sani akan pentingnya membayar pajak, setelah masyarakat paham diharapkan pembayaran pajak PBB dapat sesuai aturan dan tepat pada waktunya, terakhir perlunya penambahan petugas pemungut pajak agar mampu menjangkau masyarakat yang berada di jorong berbeda

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian, S. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Afwadi. (2010). Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: Antara Format Adat Atau Format Negara. *Juris, Volume 9 No. 1*, 55.
- Bohari. (2012). *Pengantar Hukuum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2020). *POST-QUALITATIVE SOCIAL RESEARCH METHODS Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods-Positivisim-Postpositivisim-Phenomonology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode dan Laporan*. Jakarta: KENCANA.
- Desnaromatica. (2016). Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal AKP Vo. 8 No. 2*, 56.
- Dicky, H. (2005). Sekilas Tentang Kesadaran (Consciousness). *Jurnal Buletin Psikologi Vol.13 No. 2*, 81.



- Fathurrahman, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotobaru Tengah. *JUnral Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal Vo. II Edisi 2*, 255.
- Florentinus, C. I. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kuta Kartanegara. *e-jouurnal ilmu pemerintahan Vol.3 No. 2*, 1185.
- Handayani, W. S. (2018). Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Public POLicy Vol. 4 No.1*, Halaman 96.
- Harisnawati, S. R. (2018). Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Dalam Kajian Sejarah. *Jurnal Bakaba Vol. 7 No.2*, 9.
- Lexy, J. M. (2012). *Metodologi Penelitian Kuuualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lubis, D. K. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Akutansi, keuangan & Perpajakan Indonesia (Jakpi) Vol.6 No.01*, Halaman 80.
- Meri Ernita, P. S. (2018). Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik. *Jurnal Trias Polita Vol.2 No.1*, 2.
- Muhadam, L. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintah Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Neolaka, A. (2008). *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Permanaartha. (2016). Analisi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Sedahan Kecamatan Seririt Tahun 2011-2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol. 6 No.1*, 3.
- Putri, K. D. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia (Jakpi) Vol. 6 No.1*, Halaman 81.
- Rahyunir, R. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *Jurnal Pemerintahan, politik dan Birokrasi Vol.III*, 224.
- Rendi, A. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah Yang Baik (Good Governance) DiBidang Pembinaan n Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukuum & Pembangunan 48 No.4*, 886.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Syaron Brigetiete Lantaeda, d. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusun RPJMD Kota TOMOHON. *Jurnal Administrasi Puublik Vol. 04 No. 48*, 2.
- Tenny, P. A. (2017). Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol.2 No.2*, 48.
- Theresia, A., Andini, K. S., & dkk. (2014). *PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Wirada, d. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vo.8 No.4*, Halaman 195-196.



# JPGDE

**Journal Of Policy, Governance,  
Development and Empowerment**

e\_ISSN = 2797 - 9075  
p\_ISSN = 2797 - 9199

**Publisher :**  
Center for Policy and Development Studies  
Faculty of Social Science Universitas Negeri Padang